

KURIKULUM PELATIHAN GREEN RECOVERY



DAFTAR SINGKATAN

ADD	Alokasi Dana Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CSO	Civil Society Organization
DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DID	Dana Insentif Daerah
DAU	Dana Alokasi Umum
DSCR	Debt Service Coverage Ratio
E-NDC	Enhanced Nationally Determined Contribution
GRK	Gas Rumah Kaca
HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
LTS-LCCR	Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience
MCDA	Multi Criteria Decision Analysis
MONEV	Monitoring Evaluasi
NZE	Net Zero Emissions
PEN	Pemulihan Ekonomi Negara
PFM	Public Finance Management
TKD	Transfer ke Daerah
TAKE	Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Green recovery adalah konsep yang mengacu pada cara pemulihan ekonomi setelah krisis atau resesi yang berfokus pada investasi dan kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi sumber daya, mengembangkan teknologi bersih, dan memperkuat infrastruktur hijau seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan bangunan hijau.

Green recovery menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengumumkan rencana green recovery mereka sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempercepat transisi ke ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

2. TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan peserta dari tingkat nasional, subnasional, dan CSO dalam konteks perencanaan, implementasi, dan pemantauan pemulihan hijau.
2. Meningkatkan kapasitas peserta untuk dapat menghasilkan rencana aksi yang dapat diterapkan serta rekomendasi kebijakan pemulihan hijau.
3. Menguatkan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pemulihan hijau melalui ekonomi hijau.
4. Meningkatkan keterampilan pemerintah daerah dalam melakukan analisis dokumen perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan hijau.

3. INDIKATOR CAPAIAN

1. Adanya progress peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada saat asesmen awal dibanding dengan asesmen pasca pelatihan.
2. Mampu melakukan elaborasi dari implementasi program pemulihan hijau yang telah dilakukan oleh masing-masing daerah.
3. Mampu menjelaskan aspek-aspek implementasi dan pemantauan pemulihan hijau.
4. Mampu melakukan analisis dokumen perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan hijau.

4. PENGGUNAAN MODUL

Modul pelatihan ini didesain dengan mempertimbangkan kedalaman substansi dan kesesuaian dengan konteks setiap materi yang diberikan. Hal ini mengingat sasaran utama (*target groups*) dari modul ini adalah pemerintah daerah dan CSO.

Seyogyanya, fasilitator yang memanfaatkan modul ini memiliki perspektif pendidikan dan pembelajaran orang dewasa (*andragogik*), di mana setiap peserta yang mengikuti pelatihan adalah subyek yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, aspirasi, dan keterampilan yang berbeda dan harus diberi ruang yang sama untuk berbicara, mengemukakan pendapat, dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya.

Fasilitator yang menggunakan modul ini bertindak sebagai pengatur lalu-lintas forum. Fasilitator juga sesekali mesti menjadi narasumber untuk memberi penajaman pada materi-materi yang diberikan. Variasi penggunaan metode pelatihan dan alat bantu pelatihan sangat disarankan agar peserta lebih aktif dan kreatif.

5. MATERI PELATIHAN

Modul pelatihan ini terdiri dari 6 (enam) sesi dengan pokok bahasan per sesi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Setiap sesi sudah ditentukan rincian pokok bahasan beserta durasi penyampaiannya. Namun demikian, proporsi materi dan durasi penyampaian dapat disesuaikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengisi asesmen awal pelatihan. Berikut adalah materi yang disajikan dalam modul ini:

- Sesi 1 : Orientasi Pelatihan
- Sesi 2 : Strategi Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Hijau
- Sesi 3 : Pemulihan Hijau di Daerah
- Sesi 4 : Potensi Pendanaan untuk Mendukung Pemulihan Hijau di Daerah
- Sesi 5 : Public Finance Management dalam Kerangka Kebijakan Hijau
- Sesi 6 : Kerangka Monev dalam Pemulihan Hijau

6. JADWAL PELATIHAN

Hari Pertama	Senin, 10 April 2023	PIC
14.00 – 15.00	Sesi I: Orientasi dan <i>Pre-Test</i>	Fasilitator Seknas Fitra dan LPEM FEB UI
15.00 – 16.00	<i>Break</i> dan <i>Check-in</i> Peserta	Panitia
16.00 – 17.30	Sesi I: Strategi Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Hijau	Bappenas RI
17.30 – selesai	Buka Puasa Bersama	Panitia
Hari Kedua	Selasa, 11 April 2023	PIC
09.30 – 11.00	Sesi II: Pemulihan Hijau di Daerah	LPEM FEB UI
11.00 – 12.00	Diskusi Sesi II	Fasilitator
12.00 – 13.00	<i>Break</i>	Panitia
13.00 – 14.30	Sesi III: Potensi Pendanaan untuk Mendukung Pemulihan Hijau di Daerah	LPEM FEB UI
14.30 – 15.30	Diskusi Sesi III	Fasilitator
15.30 – 16.00	<i>Break</i>	Panitia
16.00 – 17.30	Presentasi Peserta Pelatihan	Fasilitator LPEM UI
17.30	<i>Break</i>	Panitia
Hari Ketiga	Rabu, 12 April 2023	PIC
08.30-08.45	Review Hari I	Fasilitator Seknas FITRA
08.45 - 10.00	Sesi III: Public Finance Management dalam Kerangka Kebijakan Hijau	Kementerian Keuangan
10.00 – 11.30	Diskusi Sesi III	Fasilitator
11.30 – 13.00	<i>Break</i>	Panitia
13.00 – 14.30	Sesi IV: Kerangka Monev dalam Pemulihan Hijau	Fasilitator Seknas FITRA
15.30 – 17.00	Diskusi Sesi IV	Fasilitator Seknas FITRA
Hari Keempat	Kamis, 13 April 2023	PIC
09.00-11.00	Wrap up, post test, evaluasi pelatihan, diskusi rencana tindak lanjut	Fasilitator Seknas FITRA & LPEM UI
11.00-12.00	Penutupan (FITRA – UNDP)	

6. ASESMEN PESERTA

Pelatihan ini diawali dengan asesmen bagi seluruh peserta. Asesmen pada awal pelatihan dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta terkait materi-materi yang akan diberikan selama pelatihan. Asesmen dilakukan dengan sederhana di mana masing-masing peserta mencontreng pada kolom yang sudah disediakan oleh fasilitator dalam plano yang ditempel di dinding ruangan pelatihan. Asesmen yang sama dilakukan pada akhir pelatihan atau pada akhir setiap sesi pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui progress peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pra-pelatihan dan pasca pelatihan. Berikut adalah contoh alat asesmen yang dapat digunakan:

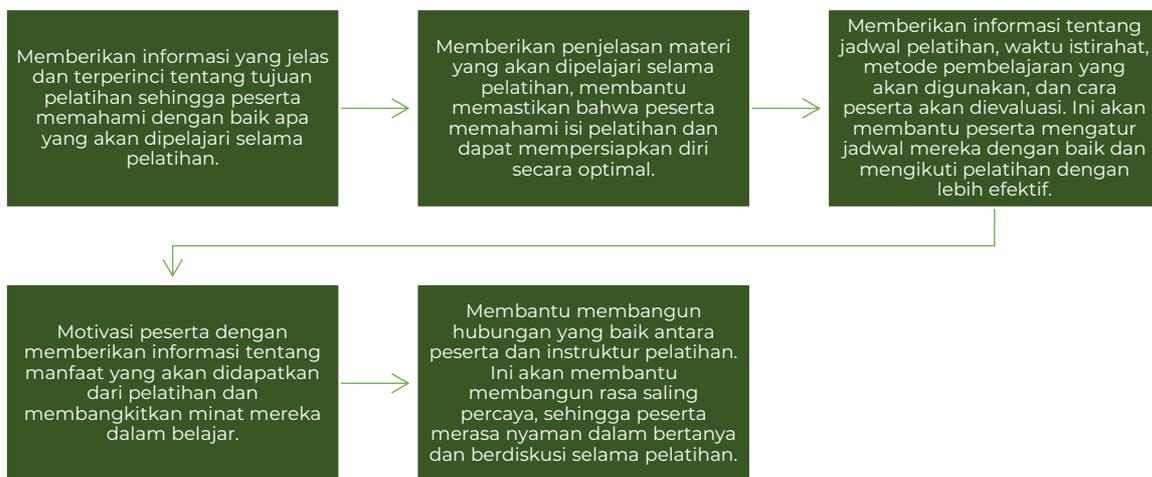
No	Soal	Pilihan Jawaban			
		A	B	C	D
1	Manakah dari langkah-langkah berikut yang tidak dipertimbangkan ke dalam bagian dari kerangka pemulihan hijau?	Identifikasi dampak COVID-19 terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan	Identifikasi sektor prioritas beserta kegiatan turunannya untuk agenda pemulihan hijau	Menitikberatkan identifikasi dan fokus terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim saja	Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk agenda pemulihan
2	Indikator apa yang tidak termasuk dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan pemulihan hijau	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Politik
3	Dari daftar berikut, yang bukan merupakan tujuan melakukan analisis menggunakan metode Multi Criteria Decision Analysis?	Menghitung potensi pajak dari sektor terpilih	Mengambil keputusan atas permasalahan	Menentukan sektor pilihan	Membandi-ngkan beberapa alternatif sektor pilihan
4	Dari daftar berikut, manakah yang tidak termasuk tahapan pemilihan sektor potensial menggunakan MCDA?	Mengidentifikasi indikator yang digunakan	Menentukan tujuan dan keputusan apa yang ingin dibuat	Mengevaluasi peringkat berdasarkan nilai	Menentukan bobot setiap indikator
5	Manakah komponen Transfer ke Daerah (TKD) berikut yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program/kegiatan terkait lingkungan?	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)	Dana Insentif Daerah (DID)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Lingkungan Hidup
6	Berikut merupakan persyaratan pengajuan pinjaman daerah, kecuali	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 4 kali	Pemda tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat	Kegiatan yang dibiayai harus sesuai dengan dokumen RPJMD dan RKPD	Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD TA sebelumnya
7	Manakah yang merupakan sumber pendanaan untuk alokasi dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)?	Pajak dan Retribusi Daerah	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Reboisasi	Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Lingkungan Hidup

Orientasi Pelatihan

Pengantar

Sesi ini bertujuan menggali pengetahuan awal peserta. Sesi ini merupakan proses awal dalam pelatihan di mana peserta diberikan informasi dan penjelasan tentang tujuan pelatihan, isi pelatihan, jadwal pelatihan, metode pembelajaran yang akan digunakan, dan aturan yang harus diikuti selama pelatihan. Orientasi pelatihan bertujuan untuk membantu peserta mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mengikuti pelatihan dengan efektif, sehingga mereka dapat memaksimalkan manfaat yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut. Selain itu, orientasi pelatihan juga dapat membantu meningkatkan motivasi peserta dan membangun rasa saling percaya antara peserta dan instruktur pelatihan.

Tujuan



Dengan demikian, orientasi pelatihan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan dengan efektif dan memaksimalkan manfaat yang mereka dapatkan dari pelatihan.

Langkah Fasilitasi



Metode Fasilitasi	Durasi	Alat Bantu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Roleplay 2. Presentasi 3. Pre Test 	60 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Power Point Presentation

Pokok Bahasan 1 : *Strategi Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Hijau*

Pengantar

Terdapat kebutuhan mendesak akan inisiatif stimulus ekonomi di Indonesia untuk membantu perekonomian pulih dari dampak pandemi COVID-19. Inisiatif pemulihan hijau memiliki peran penting yang tidak hanya menghidupkan kembali pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi ketergantungan karbon, melindungi ekosistem, dan mengentaskan kemiskinan. Inisiatif pemulihan hijau dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mempertahankan serta menciptakan lapangan kerja bagi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah dan lebih baik untuk lingkungan, terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan kota yang sehat. Tantangan utamanya adalah bahwa dalam situasi saat ini, inisiatif pemulihan hijau tidak diprioritaskan dalam program stimulus ekonomi Indonesia pasca-COVID-19, dan dalam proses penganggaran nasional Indonesia. Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp744,75 triliun (selama 2020 dan 2021) untuk penanganan dampak COVID-19 dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, alokasi untuk inisiatif pembangunan rendah karbon adalah sebesar Rp 7,03 triliun atau kurang dari 2% dari total anggaran tanggap pandemi (Bappenas, 2021).

Ada lima alasan utama mengapa inisiatif pemulihan hijau tidak diprioritaskan dalam proses penganggaran nasional Indonesia. Pertama, prakarsa ekonomi hijau umumnya dianggap sebagai jangka panjang dan, dengan demikian, secara inheren kurang mendesak. Kedua, sumber daya keuangan pemerintah Indonesia terbatas, terutama di masa krisis ini. Ketiga, sinergi yang kurang kuat antar dan intra-sektoral dan kementerian menghambat pengembangan dan pendanaan inisiatif pemulihan hijau. Keempat, ada pengaruh politik yang relatif kecil pada badan legislatif Indonesia untuk menghargai prinsip-prinsip ekonomi hijau. Kelima, PEN belum memprioritaskan inisiatif pemulihan hijau.

Tujuan



Sub Materi

1. Ekonomi Hijau dan Implementasinya di Level Provinsi
2. Tantangan dalam implementasi pemulihan hijau pada saat Covid-19
3. Strategi untuk memprioritaskan pemulihan hijau post Covid-19
4. Roadmap pemulihan hijau Indonesia
5. Sektor potensial dalam inisiatif pemulihan hijau Indonesia
6. Keterlibatan peran stakeholders
7. Peran daerah dalam mendukung upaya pemulihan hijau

Langkah Fasilitasi



Metode Fasilitasi	Durasi	Bahan Bacaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Tanya Jawab 	180 Menit	GREEN RECOVERY ROADMAP INDONESIA 2021–2024 (BAPPENAS)

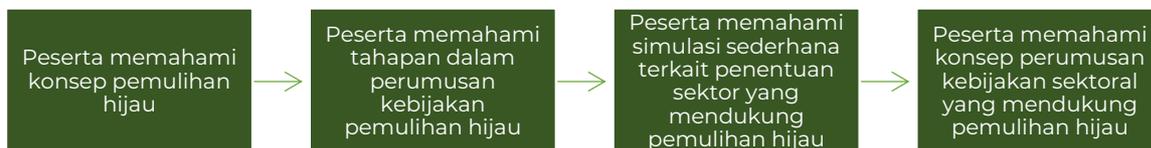
Pokok Bahasan 2: Pemulihan Hijau di Daerah

Pengantar

Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang cukup besar pada perekonomian Indonesia dan global. Pemerintah negara-negara di dunia berfokus pada alokasi penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi sebagai akibat pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar dan mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian. Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada kemungkinan terberat yakni ancaman dari perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia telah dirasakan melalui peningkatan suhu yang mencapai 0.2 – 0.3 C dalam satu dekade dan diprediksi untuk terus meningkat ditandai dengan penurunan curah hujan, peningkatan air laut, kehilangan biodiversitas, dan masih banyak dampak lingkungan lainnya (Hulme and Sheard, 1999; Boer and Faqih, 2004; Naylor et al., 2007; Cruz et al., 2007).

Pemulihan pasca pandemi COVID-19 perlu dioptimalisasi melalui konsep *Build Back Better* dan *Build Forward Better*. Konsep *Build Back Better* memberikan tujuan pada pemerintah untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula (yang lama) dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Bappenas, 2020). Sementara konsep *Build Forward Better* merupakan langkah bersama dalam pemulihan ekonomi yang mengedepankan agenda pencapaian SDGs, salah satunya mengintegrasikan dan menyeimbangkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan (Halimatussadiyah et. al, 2020). Dalam melakukan implementasi pemulihan hijau di sebuah negara, peran daerah vital dalam mengeksekusi pemulihan hijau baik di daerah tersebut maupun dalam skala nasional.

Tujuan



Sub Materi

1. Memahami profil, potensi, dan risiko lingkungan di daerah
2. Melakukan pemetaan sektor potensial
3. Merencanakan kebutuhan financing
4. Melakukan seleksi dan pemilihan indikator keberlanjutan
5. Memetakan kebijakan terkait sektor potensial yang mendukung transisi ekonomi hijau
6. Melakukan monitoring dan evaluasi dari program terkait pemulihan hijau

Langkah Fasilitasi



Metode Fasilitasi	Durasi	Bahan Bacaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Tanya Jawab 3. Praktik Kerja Kelompok dibagi berdasarkan daerah (kab/Kota) 	2.5 Jam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advancing the Transition to an Inclusive Green Economy (UNEP) 2. Operasionalisasi MCDA: Metode Normalisasi

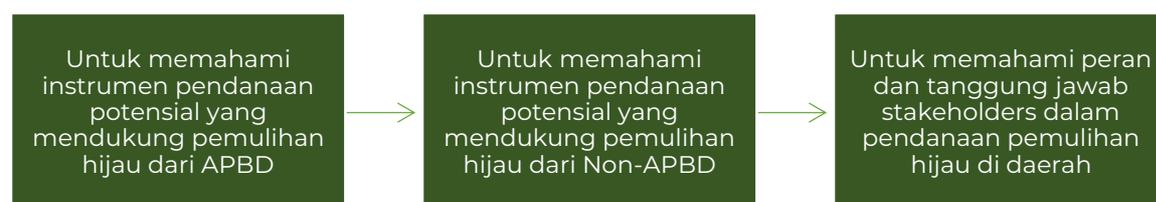
Pokok Bahasan 3 : *Potensi Pendanaan untuk Mendukung Pemulihan Hijau di Daerah*

Pengantar

Indonesia rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim, baik dampak terhadap kesejahteraan sosial, perekonomian, maupun lingkungan. Perkiraan dari Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim dapat menelan biaya antara 2,5% hingga 7% dari PDB Indonesia. Bappenas (2019) memperkirakan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim bisa mencapai Rp115 triliun pada tahun 2024. Risiko signifikan yang harus ditanggung Indonesia telah mendorong Pemerintah Indonesia (GoI) baru-baru ini untuk meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dibandingkan dengan kondisi BAU. Pada tahun 2021, Indonesia juga telah menetapkan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR), dengan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dengan target yang ambisius, biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target NDC sangat besar. Dalam skenario optimis, estimasi total kebutuhan pembiayaan sekitar USD446,5 miliar (34,6% dari PDB periode 2020-2024) atau setara dengan USD21,9 miliar per tahun. Namun, kapasitas APBN hanya mampu menutupi 34% dari kebutuhan pembiayaan dan 66% kebutuhan pembiayaan sisanya harus dipenuhi oleh pendanaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sumber swasta dan internasional (Badan Kebijakan Fiskal, 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim dan lingkungan yang sangat besar, pemerintah harus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan publik dan non-publik, terutama peran pembiayaan publik agar dapat me-leverage pendanaan swasta. Disamping itu, dengan kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda antar daerah menuntut peran aktif pemerintah daerah untuk fokus pada pencapaian sasaran ketahanan iklim dan kualitas lingkungan di daerahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewenangan terkait pengelolaan lingkungan dan risiko bencana, sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Tujuan



Sub Materi

1. Pentingnya Optimalisasi Pendanaan untuk Mendukung Agenda Pemulihan Hijau di Daerah
2. Kerangka Kebijakan Fiskal Hijau di Daerah
3. Gambaran Postur Fiskal Daerah
4. Instrumen Pendanaan Potensial untuk Mendukung Pemulihan Hijau dari APBD
5. Instrumen Pendanaan Potensial untuk Mendukung Pemulihan Hijau dari Non-APBD
6. Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan
7. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Mobilisasi Pendanaan untuk Pemulihan Hijau di Daerah

Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator memberikan penjelasan materi mengenai potensi pendanaan untuk mendukung pemulihan hijau di daerah baik dari APBD maupun Non-APBD
2. Fasilitator memberikan studi kasus yang harus diselesaikan melalui diskusi kelompok mengenai pemetaan risiko yang terkait lingkungan hidup di daerah, program/kegiatan apa saja yang dilakukan dan akan diimplementasikan kedepan, status anggaran program, sumber pendanaan eksisting, dan opsi pendanaan ideal yang akan dilakukan
3. Fasilitator membagi kelompok ke dalam 4 tim berdasarkan Provinsi
4. Fasilitator akan mendampingi diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi kasus tersebut
5. Setelah selesai diskusi, setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah disusun disertai oleh tanggapan dari fasilitator.



Metode Fasilitasi	Durasi	Buku	Regulasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok 	240 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penandaan Perubahan Iklim Provinsi Jawa Barat 2. Laporan Penandaan Perubahan Iklim Provinsi Riau 3. Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah (PT SMI) 4. Mendorong Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia melalui Optimalisasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologis (LPEM UI Policy Brief) 5. Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE (Seknas FITRA) 	UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Pokok Bahasan 4 : *Public Finance Management dalam Kerangka Kebijakan Hijau*

Pengantar

Public finance management (PFM) adalah suatu konsep atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada sektor publik atau pemerintah. PFM mencakup berbagai kegiatan dan proses pengelolaan anggaran, seperti perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

Tujuan dari PFM adalah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, PFM juga bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan publik. PFM melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, keuangan, ekonomi, hukum, dan manajemen. PFM juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan.

Public finance management (PFM) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka pemulihan hijau atau *green recovery*. PFM dapat membantu pemerintah memastikan bahwa anggaran dan kebijakan yang diambil dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 tidak hanya memperbaiki perekonomian, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan dan mendorong perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Implementasi PFM atau Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia sendiri adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (PP 12/ 2019).

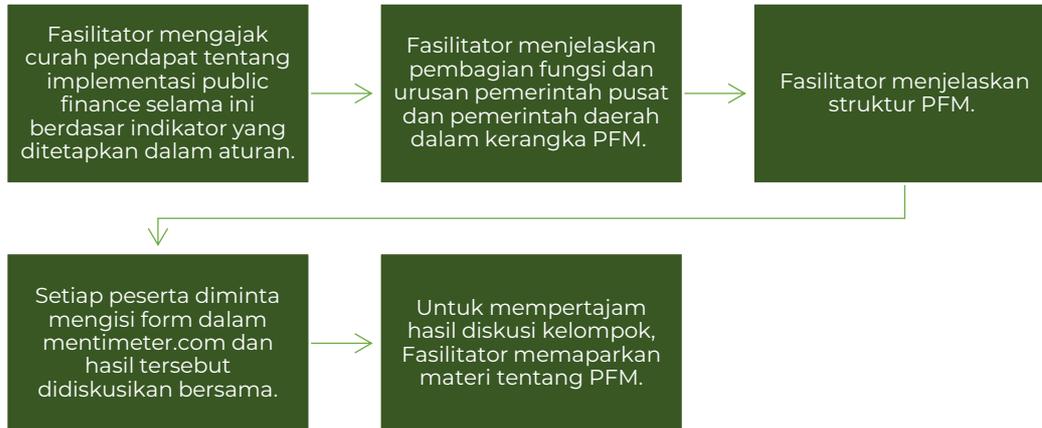
Dengan menerapkan kerangka PFM yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami konsep dan prinsip dasar PFM, serta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan;
2. Mengembangkan keterampilan dalam perencanaan anggaran yang efektif, termasuk pengembangan program dan proyek, serta pemilihan prioritas;
3. Meningkatkan kemampuan dalam penganggaran yang efektif, termasuk mengalokasikan sumber daya keuangan dan memastikan bahwa anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program dan proyek;
4. Meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan anggaran, mengelola anggaran secara efektif, termasuk pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan keuangan.
5. Memperkuat keterampilan dalam pertanggungjawaban keuangan bagaimana membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sub Materi

Langkah Fasilitasi



Metode Fasilitasi	Sub Materi	Durasi
1. Presentasi 2. Tanya Jawab 3. Curah Pendapat 4. Diskusi Interaktif (menti.com)	1. Pengantar public financial management 2. Objektif PFM 3. Konsep Green PFM 4. <i>Provide credibility to green bonds</i> 5. Siklus PFM dalam <i>fiscal transparency</i>	3 Jam

Pokok Bahasan 5: *Kerangka Monitoring dan Evaluasi dalam Pemulihan Hijau*

Pengantar

Pertumbuhan ekonomi hijau berupaya mengurangi atau menghindari biaya-biaya kerusakan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan merata.¹ Komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi hijau telah tertuang dalam komitmen nasional dan global. Untuk konteks nasional sejumlah butir NAWACITA mengamanatkan aksi tentang penguatan sektor kehutanan, serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (RPJPN 2005-2025).² Untuk konteks global, komitmen Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi hijau berkontribusi pada capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Dokumen LTS-LCCR 2021 dimana Indonesia berencana mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pemulihan hijau tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tren anggaran untuk perubahan iklim pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dan puncaknya pada tahun 2020 (saat pandemi Covid-19) menjadi Rp 77,81 triliun atau setara 41% dari anggaran perubahan iklim pada tahun 2018 atau sebesar Rp 132,47 triliun. Inisiatif pemulihan hijau dapat memainkan peran penting dalam rangka pemulihan pasca pandemi sekaligus sebagai transisi menuju ekonomi hijau.

Pemulihan hijau tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tantangan semakin besar di tengah pandemi COVID-19 yang membuat keseimbangan anggaran daerah bergeser. Upaya *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Pemda sepanjang tahun 2020-2021 untuk penanggulangan COVID-19 mengorbankan anggaran yang diperlukan untuk kepentingan jangka panjang, termasuk anggaran untuk mendukung pendanaan perubahan iklim. Di dalam struktur APBD 2021, proporsi alokasi anggaran belanja untuk lingkungan hidup hanya sekitar 3% jika dibandingkan dengan pos belanja lainnya seperti pendidikan (34%), pelayanan umum (32%), kesehatan (11%), dan ekonomi (11%).

Inisiatif Pemulihan hijau dapat memainkan peran penting dalam rangka pemulihan pasca pandemi sekaligus sebagai transisi menuju ekonomi hijau. Inisiatif pemulihan hijau memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk keluarga berpendapatan rendah dan menengah, dan pada sisi yang lain lebih baik untuk lingkungan, terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan kota sehat. Ia tidak hanya membangkitkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi ketergantungan karbon, melindungi ekosistem dan menurunkan kemiskinan.

¹ Ringkasan eksekutif, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. 2018. http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20160510161543.Roadmap_Executive-Summary_ID.pdf

² Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), Oktober 2017.

Tujuan

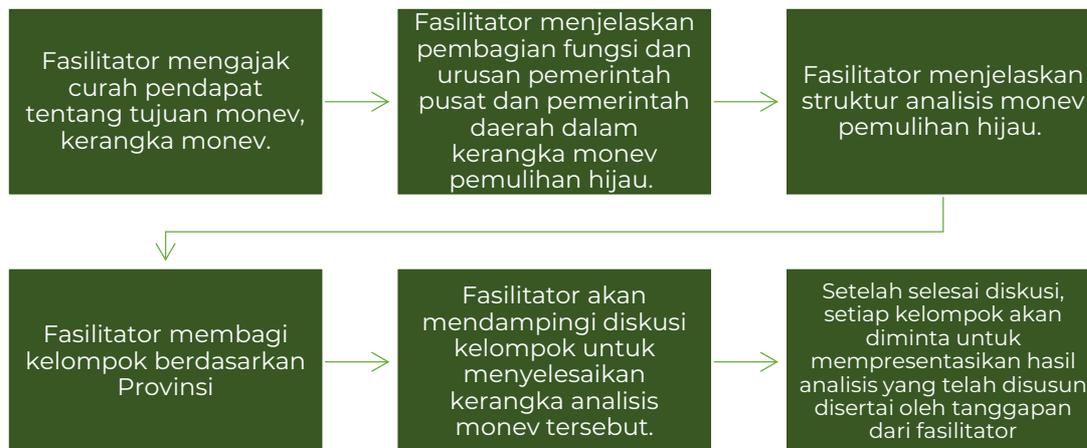
Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) inisiatif pemulihan hijau di daerah adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan dan capaian inisiatif pemulihan hijau di daerah pada dimensi kebijakan pemulihan hijau, integrasi kebijakan dengan perencanaan jangka menengah daerah, implementasi kegiatan pemulihan hijau dan outcome inisiatif pemulihan hijau
2. Mengembangkan dialog kebijakan multipihak dan memperkuat kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam implementasi pemulihan hijau di daerah
3. Memperoleh masukan untuk perbaikan peta jalan pemulihan hijau dan RPJMD

Sub Materi

1. Lingkup Monitoring dan Evaluasi
2. Penggunaan Kerangka Monitoring dan Evaluasi
3. Metode Monitoring dan Evaluasi
4. Bagan Alur Pikir Kerangka Monitoring dan Evaluasi
5. Kerangka Analisis Monitoring dan Evaluasi
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
8. Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Langkah Fasilitasi



Metode Fasilitasi	Durasi
5. Presentasi 6. Tanya Jawab 7. Curah Pendapat 8. Diskusi kelompok 9. Presentasi kelompok	4 Jam

PANDUAN DISKUSI KELOMPOK KERANGKA MONEV PEMULIHAN HIJAU

1	2
Fasilitator Membagi Peserta dalam 4 kelompok (Kebijakan, Proses, Output dan Outcome)	Setiap Kelompok dibagikan lembar diskusi berupa dimensi, defisini operasional dan salah satu kerangka analisis (Misal kelompok 1-Kebijakan, Kelompok 2-Proses dan seterusnya) Boleh juga diberikan file dalam hal kelompok ingin langsung menuliskan dalam laptop
3	4
Tugas setiap kelompok ialah melakukan review, mendiskusikan dan memberi masukan terhadap draft kerangka analisis monev untuk setiap dimensi (Kebijakan, Proses, output, outcome)	Yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok adalah mengubah (mengurangi, menambahkan, memperbaiki) substansi mulai dari aspek yang diperdalam, pertanyaan pendalaman (jika dibutuhkan), Teknik Pengumpulan data, dst
5	6
Tugas Terakhir setiap kelompok diminta menuliskan daftar instrument pengumpulan data/informasi dan instrument analisis yang perlu dikembangkan	Setiap kelompok memulai dengan menunjuk pencatat dan presentator hasil diskusi
7	8
Selanjutnya Pleno berupa presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok	Fasilitator mencatat poin-poin masukan dan mendokumentasikan hasil diskusi setiap kelompok

Seluruh materi pelatihan ini dapat diakses melalui:
<https://seknasfitra.org/implementasi-green-recovery-di-level-provinsi/>

GREEN RECOVERY



Komplek Bumi Sarinah Estate Blok D1,
Jalan Cikoko Barat, Pancoran Jakarta Selatan, 12770
sekretariat@seknasfitra.org
(021) 26966005